

**PERATURAN DESA CAMPURSALAM  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA CAMPURSALAM  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**  
**PERATURAN DESA CAMPURSALAM**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA CAMPURSALAM**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
27. Peraturan Desa Campursalam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2019);
28. Peraturan Desa Campursalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Campursalam Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Campursalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Campursalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Campursalam Tahun 2024 Nomor 4)
29. Peraturan Desa Campursalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Campursalam Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPURSALAM  
dan  
KEPALA DESA CAMPURSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CAMPURSALAM TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campursalam Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.015.206.700
2. Belanja Desa	Rp	2.132.094.020
Surplus/(Defisit)	Rp	(116.887.320)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.687.320
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	116.687.320
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

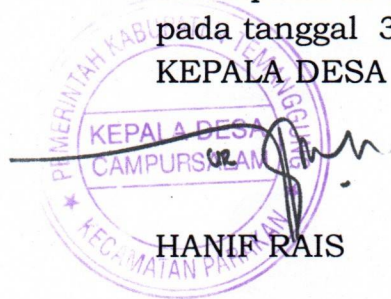
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Campursalam

Ditetapkan di Campursalam

pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA CAMPURSALAM



HANIF RAIS

Diundangkan di Campursalam

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA CAMPURSALAM



AMRI ARDIANSYAH

LEMBARAN DESA CAMPURSALAM TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPURSALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.445.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.161.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.600.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.015.206.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	490.348.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.128.820,00	
5.3.	Belanja Modal	1.062.217.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.132.094.020,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(116.887.320,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	116.887.320,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	116.887.320,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>116.887.320,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CAMPURSALAM, 30 December 2024

KEPALA DESA  
 HANIF RAIS



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CAMPURSALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

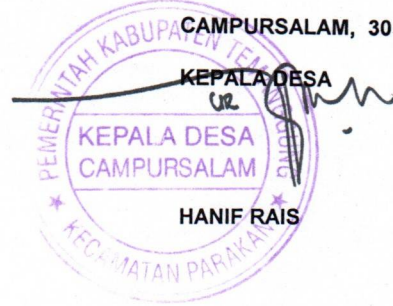
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.445.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.884.161.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.600.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.015.206.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>632.859.020,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>570.488.200,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.276.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	300.276.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.520.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.707.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.707.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.020.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	128.445.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	128.445.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>12.563.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.115.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.115.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.448.500,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.448.500,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>46.060.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	46.060.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.800.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>947.320,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	947.320,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	947.320,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.307.445.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>79.660.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	68.500.000,00	DDS, DLL
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>78.770.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	59.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.150.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.220.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
2.2.94		Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan	7.240.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	8.160.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>780.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	275.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	265.210.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	DLL, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	47.500.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	100.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.208.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	97.792.000,00	
2.3.95		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	200.000.000,00	PBP
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	192.600.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>353.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	53.500.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	250.000.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	247.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>15.515.000,00</b>	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	10.515.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	
2.5.91		Reboisasi dan penanaman turus jalan	5.000.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
			<b>22.390.000,00</b>	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	PBH
3.2.90		PHBI dan PHBN	5.000.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>17.390.000,00</b>	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>8.390.000,00</b>	PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.390.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	9.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>11.000.000,00</b>	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>11.000.000,00</b>	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>11.000.000,00</b>	DDS
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	11.000.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>158.400.000,00</b>	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b>158.400.000,00</b>	DDS
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>158.400.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	158.400.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	<b>2.132.094.020,00</b>	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>(116.887.320,00)</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>116.887.320,00</b>	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	<b>116.887.320,00</b>	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

CAMPURSALAM, 30 December 2024



*[Handwritten signature]*